

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)

TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PATI

KATA PENGANTAR

Perbaikan sistem pertanggungjawaban pejabat publik mempunyai tujuan agar penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari KKN sebagaimana diamanatkan melalui TAP MPR XI/MPR/1999, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam ketentuan tersebut perlu disusun suatu model pertanggungjawaban pejabat publik, agar kinerja pejabat publik dapat dinilai secara lebih komprehensif dan adil. Selanjutnya melalui sistem pertanggungjawaban yang baik, akan dapat dibangun pilar-pilar Good Governance yaitu transparansi dan partisipatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023, disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati tahun 2023 - 2026 dan Rencana Kerja tahun 2023. Hasil dari capaian sasaran tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam bentuk buku laporan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang telah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mewujudkan dalam bentuk laporan yang sistematis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak - pihak yang terkait.

Dengan telah disusunnya Buku LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ini diharapkan akan dapat digunakan oleh semua pihak yang berkompeten dan sangat berguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk perencanaan yang akan datang.

Pati, Pebruari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PATI



MARTINUS BUDI PRASETYA, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19690925 199001 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis.....	4
D. Permasalahan Utama.....	5
E. Sistematika Penyajian LKJI.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	7
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV P E N U T U P	
A. Kesimpulan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan mengimplementasikan SAKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

B. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dari Badan yang ada di Kabupaten Pati, yang dibentuk berdasarkan :

1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2487);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pati;

10. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati;

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Daerah Kabupaten Pati, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.

a. Fungsi

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas dibantu oleh 1 (satu) Kepala Pelaksana, 1 (satu) Sekretaris serta 3 (tiga) Kepala Bidang dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati adalah terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Kepala Pelaksana

c. Unsur Pengarah

d. Sekretariat terdiri dari :

d.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d.2. Sub Bagian Keuangan

d.3. Sub Bagian Program

e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

e.1. Seksi Pencegahan

e.2. Seksi Kesiapsiagaan

- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - f.1. Seksi Kedaruratan
 - f.2. Seksi Logistik
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - h.1. Seksi Rehabilitasi
 - h.2. Seksi Rekonstruksi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

C. ASPEK STRATEGIS

Strategi merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan Program Badan yang berorientasi pada Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan tersebut adalah :

1. Menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan penanggulangan bencana yg memadai;
2. Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
3. Menginisiasi dan mengembangkan jejaring penanggulangan bencana.
4. Menyusun kemitraan antar stakeholder/pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana
5. Membangun kesadaran kolektif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
6. Membangun kerjasama lintas sektoral dalam penanganan penanggulangan bencana
7. Menyusun struktur organisasi BPBD dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian serta sosialisasi kepada aparat.
8. Menerapkan dan mengembangkan prinsip paradigma pengurangan resiko bencana dalam usaha penanggulangan bencana, akuntabilitas pelayanan prima dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas penanggulangan bencana;

9. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam usaha penanggulangan bencana, memberikan pelayanan yang optimal dalam penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
10. Mengembangkan kerjasama lintas program, lintas SKPD, bantuan teknis dengan instansi vertikal, horizontal dan non instansi dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan dan penanggulangan bencana;
11. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana berdasarkan rencana strategik yang terkoordinasi, sinkronisasi dan tepat sasaran;
12. Menyediakan sarana pendukung yang optimal seperti penyediaan peralatan berat yang memadai, untuk penanggulangan bencana;
13. Penambahan tenaga pengawas, operator, teknis yang memadai;
14. Mengembangkan kebijakan yang mengatur program penanggulangan bencana; sosialisasi, simulasi, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana mulai pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;

D. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan Sektor Pendanaan

Walaupun masalah dana/anggaran merupakan permasalahan klasik yang sedang terjadi pula pada sektor maupun kelembagaan lain namun demikian permasalahan lain sebenarnya sungguh menjadi hambatan utama bagi institusi yang mempunyai tupoksi pada penanggulangan bencana .

2. Peran Kelembagaan

Pendirian BPBD dengan Perda merupakan sebuah dukungan politik yang sangat diperlukan dari rakyat yang dipresentasikan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dengan dukungan politis tersebut tidak hanya sektor anggaran saja yang akan teratasi namun juga kebijakan kebijakan lain yang berkaitan dengan kebencanaan termasuk upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

3. Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Permasalahan yang ada pada sumber daya manusia sektor publik adalah tingkat pemahaman dalam manajemen penanggulangan bencana di semua level. Indikatornya terletak pada proses pembuatan

kelembagaan yang akan menangani bencana masih banyak berorientasi pada bersifat responsif dari pada preventif.

4. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih minim. Walaupun minim penanganan bencana di Kabupaten Pati tetap di upayakan semaksimal mungkin.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj-IP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian Isu Strategis, tujuan dan sasaran pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKj-IP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Perencanaan Kinerja;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja (Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran);
- Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

A.1. Rencana Strategis 2023 – 2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi yang membantu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggung jawabnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagai dokumen yang mengimplementasikan kebijakan dan program Kabupaten Pati yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kab. Pati.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 juga dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 dimana diangkat 4 (empat) isu strategis Kabupaten Pati yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
 - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan);
 - 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat;
 - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah;
 - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat;
 - 1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah;
 - 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
 - 2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;
 - 2.2 Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
 - 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
 - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
 - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
 - 6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati masuk di dalam tujuan yang pertama yaitu Pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Maka sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pati dalam penanggulangan Bencana didukung dengan pelaksanaan program kegiatan diharapkan peran kesiapsiagaan / internalisasi upaya mitigasi bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui peningkatan civil society awareness dan kepedulian dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kualitas aparatur dan penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana diharapkan berperan besar sehingga dapat menciptakan iklim perekonomian yang stabil dan kondusif.

Untuk itu kontribusi BPBD Kabupaten Pati sesuai isu strategis di dalam RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dimana dengan indikator Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB dengan target pada tahun 2023 sebanyak 0,064 %, tahun 2024 sebanyak 0,063 %, tahun 2025 sebanyak 0,062 % dan tahun 2026 (kondisi akhir RPD Kabupaten Pati) sebanyak 0,061 %.

A.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 tujuan yang ingin dicapai yaitu Penurunan Resiko Bencana Daerah dengan indikator tujuannya Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB dengan target 0,064 % dan terealisasi sebesar 0,0025 %.

Adapun formula perhitungannya adalah jumlah kerugian yang diakibatkan oleh Bencana tahun 2023 dibagi dengan Jumlah PDRB (ADHB) Kabupaten Pati Tahun 2023 dikali 100 %.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Adapun formula perhitungannya adalah Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, dimana proses perhitungannya menggunakan tools yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menggunakan 71 indikator dan 284 pertanyaan dimana hasil yang didapatkan adalah berupa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kab. Pati

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-			
				1	2	3	4
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penurunan Resiko Bencana Daerah		Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	0,064	0,063	0,062	0,061
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulang an bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0,32	0,40	0,46	0,52

PROGRAM

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian satuan terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 3.921.092.000,-

Secara teknis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 tersebut dijabarkan ke dalam 2 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Program Penanggulangan Bencana.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penurunan resiko bencana daerah	Presentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB	0,064 %
2.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	0,32

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.199.620.500,00	APBD Kab.
2. Program penanggulangan bencana	Rp. 721.471.500,00	APBD Kab.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pati tahun anggaran 2023 melaksanakan 2 (dua) program untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama yaitu program Penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp.3.921.092.000,00.



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT
Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, November 2023

Pihak Kedua,

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pihak Pertama,

MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indikator Tujuan		
	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB		0,64
2.	Indikator Sasaran		
	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		0,32
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71,208
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71,648
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1,525
		Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	30

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.199.620.500	APBD KAB
2. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 721.471.500	APBD KAB

Pati, November 2023

Pj Bupati Pati

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Pati



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT



MARTINUS BUDI PRASETYA, S. Sos



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUWONDO, SH., MM

Jabatan : Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTINUS BUDI PRASETYA, S.Sos

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 1 November 2023



Pihak Kedua,
MARTINUS BUDI PRASETYO, S.Sos

Pihak Pertama,

SUWONDO, SH., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPBD KABUPATEN PATI

Unit Kerja : Bagian Sekretariat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	8 dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun	7 dokumen
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen
4.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	34 stell
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Jumlah laporan administrasi umum	6 jenis
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi yang disediakan	3 jenis
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun	31 unit

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.073.500,00	APBD KAB
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.342.253.000,00	APBD KAB
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Rp. 16.560.000,00	APBD KAB
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 17.000.000,00	APBD KAB
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp. 262.576.100,00	APBD KAB
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 435.372.000,00	APBD KAB
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 94.585.900,00	APBD KAB

Pati, 1 November 2023




 Kepala Pelaksana BPBD

 Kabupaten Pati

 MARTINUS BUDI PRASETYO, S.Sos

Kepala Sekretariat

 BPBD Kabupaten Pati



 SUWONDO, SH., MM



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUKARNO, S.Kep., M.Kes
Jabatan : Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pati
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : MARTINUS BUDI PRASETYA, S.Sos
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 1 November 2023

Pihak Pertama,

SUKARNO, S.Kep., M.Kes

Pihak Kedua,



MARTINUS BUDI PRASETYO, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPBD KABUPATEN PATI


Unit Kerja : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota.	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100 %
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	100 %
		Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disediakan	100 %
		Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi	1 dokumen
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM suburusan bencana daerah kabupaten/ kota	100 %

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota.	Rp. 50.726.590,00	APBD KAB
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Rp. 330.795.410,00	APBD KAB

Pati, 1 November 2023

Kabid. Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
BPBD Kabupaten Pati



SUKARNO, S.Kep., M.Kes



MARTINUS BUDI PRASETYO, S.Sos

Lampiran :
2.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN PATI

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2023										Sifat Kegiatan	Ket	
										Hasil (outcome) kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)			Sumber Dana			
								Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum perubahan			Sesudah perubahan
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1						PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										3.816.092.000	3.921.092.000	105.000.000				
1	05					KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										3.816.092.000	3.921.092.000	105.000.000				
1	051					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya pelaksanaan penunjang urusan	Prosentase terlaksananya pelaksanaan penunjang urusan	Prosentase terlaksananya pelaksanaan penunjang urusan	Prosentase terlaksananya pelaksanaan penunjang urusan	BPB D Kabupaten	BPB D Kabupaten	100 %	100 %		3.094.620.500	3.199.620.500	105.000.000				

						pemerintah n daerah kabupaten	pemerintah n daerah kabupaten	pemerintah n daerah kabupaten	pemerintah n daerah kabupaten	Pati	Pati									
1	0 5	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	BPB D Kab upat en Pati	BPB D Kab upat en Pati	100 %	100 %	21.816. 000	26.073. 500	4.257 .500	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPB D Kab upat en Pati	BPB D Kab upat en Pati	2 Doku men	2 Doku men	5.916.0 00	5.916.0 00	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPB D Kab upat en Pati	BPB D Kab upat en Pati	1 Doku men	1 Doku men	4.100.0 00	5.200.0 00	1.100 .000	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPB D Kab upat en Pati	BPB D Kab upat en Pati	1 Doku men	1 Doku men	4.100.0 00	5.128.0 00	1.028 .000	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	3 Lapo an	3 Lapo an	7.700.000	9.829.500	2.129.500	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah administrasi laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	Prosentase jumlah administrasi laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	2.341.688.000	2.342.453.000	765.000	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	19 Orang /bula n	19 Orang /bula n	2.298.523.000	2.298.523.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	2 Doku men	2 Doku men	30.840.000	31.605.000	765.000	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	1 Lapo an	1 Lapo an	3.825.000	3.825.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
1	0 5	0 1	2. 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	2 Lapor an	2 Lapor an	8.500.0 00	8.500.0 00	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	16.560. 000	16.560. 000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	2 Lapor an	2 Lapor an	16.560. 000	16.560. 000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaia n pada	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaia n pada	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaia n pada	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaia n pada	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	17.000. 000	17.000. 000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

						Perangkat daerah	Perangkat daerah	Perangkat daerah	Perangkat daerah											
1	05	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	33 stell	33 stell	17.000.000	17.000.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	185.152.500	267.576.100	82.423.600	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	5 jenis	5 jenis	2.756.800	4.606.800	1.850.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	5 paket	5 paket	1.613.000	3.469.000	1.856.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	05	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	6 paket	6 paket	105.901.550	135.911.150	30.009.600	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		

1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	6 paket	6 paket	2.923.650	3.076.650	153.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	24 doku men	24 doku men	3.186.000	3.186.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	5 Laporan	5 Laporan	68.771.500	117.326.500	48.555.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	448.682.000	435.372.000	(13.310.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	300 laporan	300 laporan	1.700.000	1.700.000	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	3 laporan	3 laporan	96.600.000	96.600.000	-	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum		

LRJ-IP BPBD KABUPATEN PATI TAHUN 2023

						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								(DA U)	(DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	14 lapora n	14 lapora n	350.382 .000	337.072 .000	(13.3 10.00 0)	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	63.722. 000	94.585. 900	30.86 3.900	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	31 unit	31 unit	49.492. 000	77.379. 900	27.88 7.900	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	5 unit	5 unit	14.230. 000	17.206. 000	2.976 .000	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

					BIDANG URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA										-					
1	0 5	0 3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	prosentase terlaksananya a pelaksanaan penanggulan gan bencana alam	prosentase terlaksananya a pelaksanaan penanggulan gan bencana alam	prosentase terlaksananya a pelaksanaan penanggulan gan bencana alam	prosentase terlaksananya a pelaksanaan penanggulan gan bencana alam	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	721.471 .500	721.471 .500	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 3	2. 0 1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	42.782. 090	50.726. 590	7.944 .500	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0 5	0 3	2. 0 1	0 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatka n Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	71.208 orang	71.208 orang	42.782. 090	50.726. 590	7.944 .500	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

1	0	0	2.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya masyarakat tangguh bencana dan laporan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Terbentuknya masyarakat tangguh bencana dan laporan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Terbentuknya masyarakat tangguh bencana dan laporan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Terbentuknya masyarakat tangguh bencana dan laporan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	BPB D Kabupaten Pati	BPB D Kabupaten Pati	100 %	100 %	338.739.910	330.795.410	(7.944.500)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	BPB D Kabupaten Pati	BPB D Kabupaten Pati	1 Dokumen	1 Dokumen	18.484.000	12.841.500	(5.642.500)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	BPB D Kabupaten Pati	BPB D Kabupaten Pati	40 orang	40 orang	63.378.550	53.146.550	(10.232.000)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1	0	0	2.	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPB D Kabupaten Pati	BPB D Kabupaten Pati	1 Dokumen	1 Dokumen	52.253.070	56.603.070	4.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (DAU)		

1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	40 Unit	40 Unit	21.962.890	21.962.890	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	1 Doku men	1 Doku men	142.009.550	145.666.050	3.656.500	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	300 Orang	300 Orang	40.651.850	40.575.350	(76.500)	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	prosentase terlaksananya pelaksanaan SOP dan kebijakan penanganan bencana	prosentase terlaksananya pelaksanaan SOP dan kebijakan penanganan bencana	prosentase terlaksananya pelaksanaan SOP dan kebijakan penanganan bencana	prosentase terlaksananya pelaksanaan SOP dan kebijakan penanganan bencana	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	100 %	100 %	290.653.500	290.653.500	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	425 Orang	425 Orang	200.299.000	200.299.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

1	0	0	2.	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana	BPB D Kabupat en Pati	BPB D Kabupat en Pati	1.100 Orang	1.100 Orang	90.354. 500	90.354. 500	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana	prosentase terlaksananya a pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan gan Bencana	BPB D Kabupat en Pati	BPB D Kabupat en Pati	100 %	100 %	49.296. 000	49.296. 000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulan gan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulan gan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulan gan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulan gan Bencana di Daerah	BPB D Kabupat en Pati	BPB D Kabupat en Pati	1 Doku men	1 Doku men	2.828.0 00	2.828.0 00	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	BPB D Kabupat en Pati	BPB D Kabupat en Pati	1 Doku men	1 Doku men	4.336.7 00	4.336.7 00	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan gan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan gan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan gan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan gan Bencana	BPB D Kabupat en Pati	BPB D Kabupat en Pati	1 Doku men	1 Doku men	3.058.3 00	3.058.3 00	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		

1	0	0	2.	0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	1 Doku men	1 Doku men	22.946.000	22.946.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggulan gan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggulan gan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggulan gan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggar aan Penanggulan gan Bencana	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	1 Lapor an	1 Lapor an	6.877.000	6.877.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
1	0	0	2.	0	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	BPB D Kabu paten Pati	BPB D Kabu paten Pati	1 Doku men	1 Doku men	9.250.000	9.250.000	-	Dana Alok asi Umu m (DA U)	Dana Alok asi Umu m (DA U)		
JUMLAH														3.816.092.000	3.921.092.000	105.000.000				

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada sub bab capaian kinerja organisasi akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
- Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sedangkan Sub bab Realisasi Anggaran akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

A. **Capaian Kinerja Organisasi**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pati dapat dilihat sebagai berikut;

- 1. Indikator Kinerja Pertama yaitu Tujuan Penurunan Resiko Bencana Daerah dengan indikator tujuannya Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB.



Indikator Kinerja Pertama yaitu Tujuan Penurunan Resiko Bencana Daerah dengan indikator tujuannya Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB :

- Tahun 2023, target sebesar 0,064 % dengan capaian sebesar 0,0025 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih rendah dari target.
Capaian sebesar 0,0025 % masih bersifat sementara, hal ini disebabkan oleh pada saat perhitungan hanya terdapat data kerugian bencana di tahun 2023 dan sedangkan data PDRB Kabupaten Pati Tahun 2023 belum dirilis nya data oleh BPS Kabupaten Pati.

- 2. Indikator Kinerja Kedua yaitu Sasaran Meningkatnya Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan Indikator Sasaran Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.



Indikator Kinerja Kedua yaitu Sasaran Meningkatnya Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan Indikator Sasaran Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana :

- Tahun 2023, target sebesar 0,32 dengan capaian sebesar 0,49 hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih tinggi dari target.

Capaian ini berdasarkan hasil perhitungan Indeks kapasitas daerah (IKD) Kabupaten Pati Tahun 2023 yang telah diverifikasi oleh Tim Evaluator dari BNPB serta berdasarkan surat BNPB Tanggal 15 Januari 2024; Nomor : B-20.13/BNPB/D-1/SS.01.03/01/2024; Hal : Penyampaian Hasil IKD 2023 dan IRBI 2023 Provinsi Jawa Tengah

3. Indikator Kinerja Ketiga yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

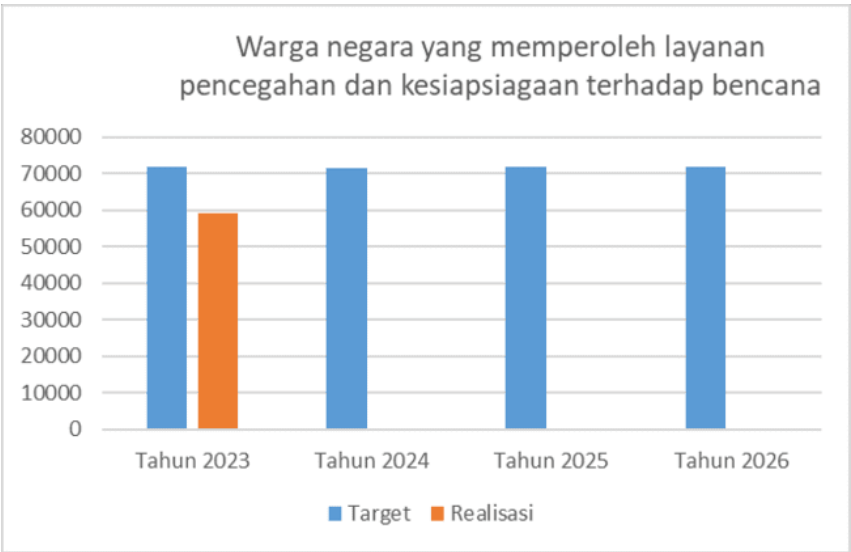


Indikator Kinerja Ketiga Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana :

- Tahun 2023, target sebesar 71.208 warga dengan capaian sebesar 486.384 warga, hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih tinggi daripada target.

Capaian ini berdasarkan hasil perhitungan dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kebencanaan Kabupaten Pati Tahun 2023 pada aplikasi ESPM Dirjen Bangda Tahun 2023.

4. Indikator Kinerja Keempat Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

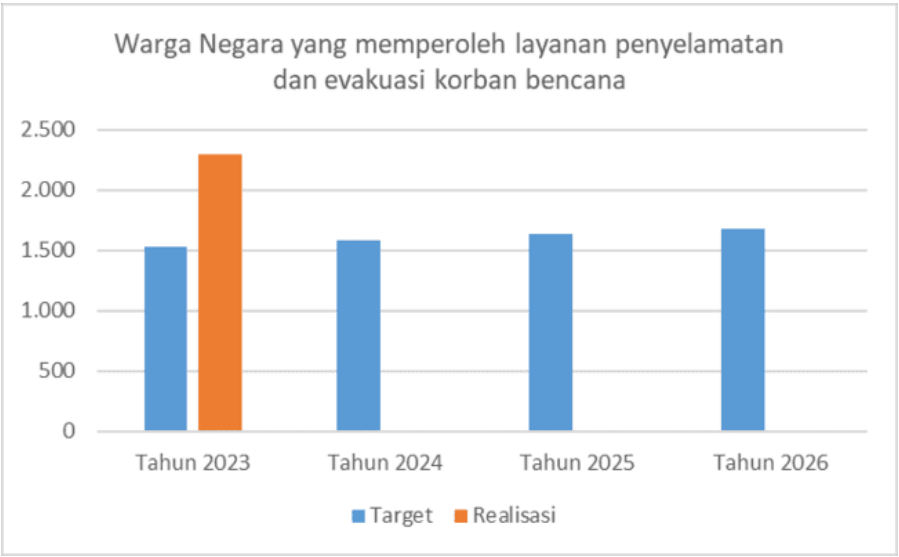


Indikator Kinerja Keempat Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana :

- Tahun 2023, target sebesar 71.648 warga dengan capaian sebesar 59.071 warga, hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih rendah daripada target.

Capaian ini berdasarkan hasil perhitungan dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kebencanaan Kabupaten Pati Tahun 2023 pada aplikasi ESPM Dirjen Bangda Tahun 2023.

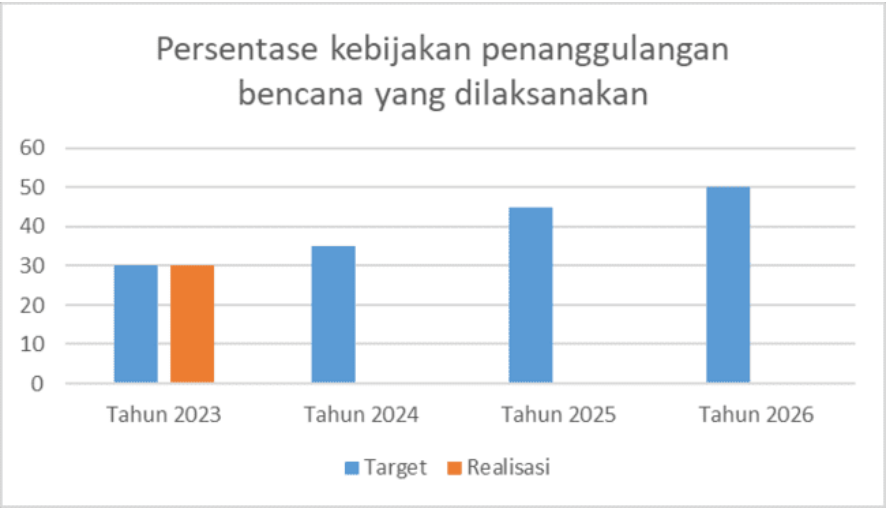
5. Indikator Kinerja Kelima Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



Indikator Kinerja Kelima Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

- Tahun 2023, target sebesar 1.525 warga dengan capaian sebesar 2.298 warga, hal ini menunjukkan bahwa realisasi lebih tinggi daripada target.
Capaian ini berdasarkan hasil perhitungan dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kebencanaan Kabupaten Pati Tahun 2023 pada aplikasi ESPM Dirjen Bangda Tahun 2023.

6. Indikator Kinerja Keenam Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.



Indikator Kinerja Keenam Program Penanggulangan Bencana dengan Indikator Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan.

- Tahun 2023, target sebesar 30 persen dengan capaian sebesar 30 persen, hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target yang ditetapkan.

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional.

Pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pati dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023
BPBD Kabupaten Pati

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT KAN PELAYANA N	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN = (5/4) x 100 %	JUMLAH APBD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	486.384	486.384	100%	50.726.590
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	59.071	59.071	100%	330.795.410
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.298	2.298	100%	290.653.500

Dari tabel diatas terlihat bahwa BPBD Kabupaten Pati sudah bisa memenuhi SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat diketahui dari capaian beberapa indikator jenis layanan dasar yang memenuhi target.

B Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kejadian bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat kita duga sebelumnya, sesuai dengan tupoksinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati di Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

C Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten pati didukung oleh 35 personil yang terdiri dari 19 orang PNS dan 13 orang Non PNS. Jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang terutama jumlah PNSnya serta tingkat pemahaman dalam manajemen penanggulangan bencana di semua level indikatornya terletak pada proses pembuatan kelembagaan yang akan menangani bencana masih banyak berorientasi pada bersifat responsif dari pada preventif.

- Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Peralatan) Penanggulangan Bencana

Sarana dan prasarana dalam evakuasi bencana masih minim. Sejak berdiri tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pati mendapat limpahan aset penanggulangan bencana dari Kantor Kesbangpol Pati, bantuan dari BNPB dan pembelian dari dana APBD Kab. Pati. Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penanganan bencana di wilayah tetap diupayakan dan diusahakan.

- Sumber Daya Keuangan

Masalah dana/anggaran merupakan permasalahan klasik yang sedang terjadi pula pada sektor maupun kelembagaan. Dengan anggaran yang ada di BPBD saat ini dirasa sudah cukup untuk kegiatan rutin BPBD, tetapi apabila ada bencana terjadi dan memerlukan rehabilitasi sudah di akomodir di Dana Tak Terduga dan SKPD Teknis terkait.

D Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati didukung oleh Program penanggulangan bencana; 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan yaitu :

	Program penanggulangan bencana
1	Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
	a. Sub kegiatan sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota.
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota. b. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota; c. Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota; d. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. e. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi; f. Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	a. Sub kegiatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota; b. Sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.
4	Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana
	a. Sub kegiatan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota; b. Sub kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota c. Sub kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota; d. Sub kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; e. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; f. Sub kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **3.715.678.539,-** atau 94,76 % dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp. **3.921.092.000,-**

Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023 BPBD Kab. Pati

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif			Ket
						Anggaran	Realisasi	Prosentase	
1					2	3	4	5	6
1					PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.921.092.000	3.715.678.539	94,76	
1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.921.092.000	3.715.678.539	94,76	
1	05	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.199.620.500	3.028.347.449	94,65	
1	05	01	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.073.500	25.789.200	98,91	
1	05	01	2. 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.916.000	5.884.200	99,46	
1	05	01	2. 01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.200.000	5.175.000	99,52	
1	05	01	2. 01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.128.000	5.078.000	99,02	

1	05	01	2. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.829.500	9.652.000	98,19	
1	05	01	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.342.453.000	2.207.574.721	94,24	
1	05	01	2. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.298.523.000	2.163.954.621	94,15	
1	05	01	2. 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.605.000	31.605.000	100,00	
1	05	01	2. 02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.825.000	3.609.700	94,37	
1	05	01	2. 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.500.000	8.405.400	98,89	
1	05	01	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.560.000	16.560.000	100,00	
1	05	01	2. 03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.560.000	16.560.000	100,00	
1	05	01	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	16.966.000	99,80	
1	05	01	2. 05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.000.000	16.966.000	99,80	
1	05	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.576.100	259.753.832	97,08	
1	05	01	2. 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.606.800	4.577.050	99,35	

1	05	01	2. 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.469.000	3.454.000	99,57	
1	05	01	2. 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.911.150	135.799.340	99,92	
1	05	01	2. 06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.076.650	3.070.000	99,78	
1	05	01	2. 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.186.000	3.186.000	100,00	
1	05	01	2. 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.326.500	109.667.442	93,47	
1	05	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.372.000	407.798.048	93,67	
1	05	01	2. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.692.200	99,54	99
1	05	01	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000	72.709.455	75,27	
1	05	01	2. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.072.000	333.396.393	98,91	
1	05	01	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.585.900	93.905.648	99,28	
1	05	01	2. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.379.900	76.890.148	99,37	
1	05	01	2. 09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.206.000	17.015.500	98,89	

					BIDANG URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	721.471.500	687.331.090	95,27	
1	05	03	2. 01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	50.726.590	48.287.800	95,19	
1	05	03	2. 01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	50.726.590	48.287.800	95,19	
1	05	03	2. 02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	330.795.410	319.353.092	96,54	
1	05	03	2. 02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	12.841.500	12.504.985	97,38	
1	05	03	2. 02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	53.146.550	52.845.450	99,43	
1	05	03	2. 02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	56.603.070	49.188.123	86,90	
1	05	03	2. 02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	21.962.890	20.904.825	95,18	
1	05	03	2. 02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	145.666.050	144.889.949	99,47	
1	05	03	2. 02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	40.575.350	39.019.760	96,17	
1	05	03	2. 03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	290.653.500	270.478.798	93,06	

1	05	03	2. 03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.299.000	190.571.198	95,14	
1	05	03	2. 03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	90.354.500	79.907.600	88,44	
1	05	03	2. 04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.296.000	49.211.400	99,83	
1	05	03	2. 04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.828.000	2.813.000	99,47	
1	05	03	2. 04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	4.336.700	4.314.950	99,50	
1	05	03	2. 04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	3.058.300	3.055.900	99,92	
1	05	03	2. 04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	22.946.000	22.910.550	99,85	
1	05	03	2. 04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	6.877.000	6.871.000	99,91	
1	05	03	2. 04	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	9.250.000	9.246.000	99,96	
JUMLAH						3.921.092.000	3.715.678.539	94,76	

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pati

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan											
	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB			0,064	0,063	0,062	0,061	0,0025	0	0	0	
	Indikator Sasaran											
	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana			0,32	0,40	0,46	0.52	0,49	0	0	0	
	Indikator program											
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			71.208	71.208	71.208	71.208	486.384	0	0	0	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap			71.648	71.638	71.648	71.648	59.071	0	0	0	

	bencana											
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			1.525	1.580	1.630	1.680	2.298	0	0	0	
	Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan			30	35	45	50	30	0	0	0	

Sumber : BPBD Kab. Pati; 2023

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendukung terwujudnya Good Governance. Dalam perseptif Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil Evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati bisa dikatakan baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun – tahun mendatang secara terus – menerus.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Terbatasnya anggaran untuk kebencanaan

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya – upaya penanggulangan bencana antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya.

3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis serta mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua lapisan masyarakat serta instansi / lembaga pemerhati bencana.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap pengendalian fungsi – fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme sinergitas antar bidang, Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan – keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program / kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.